

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berjalannya suatu usaha, permasalahan dalam permodalan seringkali menjadi kendala dalam pengembangan dan berlanjut tidaknya usaha tersebut. Permasalahan tersebut tentu membutuhkan solusi yang cepat sehingga membantu para pelaku usaha dalam pemenuhan kebutuhan modalnya. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan adalah layanan pemberian pinjaman atau kredit. Dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya dibidang ekonomi. Kredit dari sisi pengguna atau debitur dianggap sangat penting, karena pada umumnya pengusaha mengalami hambatan permodalan untuk melakukan investasi baru atau dalam melakukan penyesuaian teknologi agar usaha mereka tetap dapat bertahan lama (Baso *et al.*, 2014). Peran kredit selain sebagai pendanaan yang dapat mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan produktivitas, juga berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Dwiastuti, 2020).

Pertanian adalah salah satu sektor usaha yang banyak membutuhkan dukungan permodalan. Modal dalam tingkat usahatani yang mikro berperan penting sebagai faktor produksi. Selain itu, ketersediaan modal juga akan meningkatkan kapasitas petani untuk menerapkan teknologi seperti benih

berkualitas, pupuk berimbang, dan teknologi pasca panen. Di era modernisasi pertanian, penggunaan modal yang intensif baik digunakan untuk pengadaan teknologi pertanian maupun sarana produksi semakin menjadi kebutuhan yang mendesak dan harus terpenuhi. Namun bagi petani, terutama bagi petani kecil, kondisi tersebut menjadi tantangan yang besar dikarenakan mayoritas petani yang tidak mampu membiayai usahatani jika hanya menggunakan dana pribadi (Ashari, 2019). Padahal modal yang cukup sangat penting untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan mereka. Oleh sebab itu, peran kredit sangat dibutuhkan dalam mengatasi kekurangan modal yang dialami oleh petani dalam menjalankan usahatani nya.

Petani umumnya mengajukan kredit pada lembaga keuangan di sekitar tempat tinggal mereka, baik kredit yang bersifat formal maupun informal. Kredit formal mencakup kredit program dan kredit nonprogram (kredit komersial). Kredit program umumnya berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, seperti program Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Kredit formal komersial meliputi bank, koperasi, dan pegadaian, yang umumnya menetapkan persyaratan cukup ketat dalam prosedur peminjaman modal. Di sisi lain, kredit informal menawarkan kemudahan dengan prosedur yang lebih sederhana dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit, seperti kewajiban menyediakan agunan seperti pada kredit formal (Ashari, 2019).

Usaha pertanian dianggap sebagai usaha dengan skala kecil yang sering kali tidak dapat memenuhi standar dari lembaga keuangan pada kredit formal seperti perbankan sehingga memiliki risiko tinggi atau tidak menguntungkan bagi lembaga. Bank dan lembaga keuangan biasanya memiliki kriteria atau standar

tertentu yang harus dipenuhi untuk pemberian pinjaman, seperti ukuran usaha, potensi keuntungan, dan risiko yang dapat diterima. Dalam situasi ini, lembaga kredit informal menjadi salah satu alternatif bagi petani untuk mendapatkan pinjaman. Kredit informal memang dapat membantu memenuhi kebutuhan keuangan petani yang mendesak, namun tingkat suku bunga yang tinggi dapat memberatkan petani dan produsen pertanian (Rozci dan Laily, 2023). Selain itu, pemberi kredit informal, yaitu pedagang, biasanya memberikan kredit tidak hanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk memaksa petani untuk secara tidak langsung menjual hasil panennya kepada mereka, sehingga mencegah petani menentukan hasil penjualannya kepada pedagang yang mampu membayar harga yang lebih tinggi.

Pemerintah mengimplementasikan kebijakan kredit pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan formal guna memperkuat usaha tani mereka. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) yang diluncurkan pada tahun 2006, serta Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada tahun 2008. Program PUAP merupakan bagian dari PNPM-Mandiri yang telah berjalan sejak 2007, dengan tujuan mendorong pengembangan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. PUAP dirancang untuk mengubah petani subsisten menjadi petani modern berorientasi agribisnis melalui pelatihan dan pendampingan penyuluh, serta dukungan modal usaha (Kementerian Pertanian, 2013). Kredit usahatani ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, mendorong swasembada, dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.

Program PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang merupakan sasaran program PUAP melalui koordinasi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota dan mengendalikan pemanfaatannya yaitu pada usaha agribisnis. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Program PUAP diharapkan dapat mempermudah petani dalam mengakses kredit formal melalui Gapoktan, sehingga mampu mengurangi ketergantungan petani pada kredit informal yang selama ini banyak digunakan untuk membiayai usahatani. Dengan akses kredit formal yang lebih baik, diharapkan petani dapat memperoleh pembiayaan yang lebih terstruktur dan mendukung keberlanjutan usaha pertanian mereka.

Suatu lembaga keuangan baik formal maupun informal akan selalu memiliki kemungkinan terjadinya kredit macet atau bermasalah, tidak terkecuali dalam pelaksanaan program PUAP ini. Penyebab adanya permasalahan kredit macet biasanya dikarenakan faktor internal dari lembaga itu sendiri maupun faktor eksternal dari lembaga keuangan. Faktor internal lembaga keuangan yang menyebabkan kredit macet contohnya seperti analisis yang kurang tepat, adanya penyalahgunaan dana oleh oknum lembaga keuangan, adanya kolusi antara pihak lembaga keuangan dan debitur (peminjam), dan kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan permasalahan pinjaman macet terdiri dari unsur kesengajaan yang

dilakukan oleh debitur seperti sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran dan unsur ketidaksengajaan seperti adanya permasalahan pada usaha debitur sehingga tidak dapat membayar angsuran pinjaman kepada lembaga keuangan (Telaumbanua *et al.*, 2022).

Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki keunggulan dalam produksi komoditas padi. Dalam rangka mendukung keunggulan tersebut, pemerintah memberikan berbagai macam bantuan agar produktivitas tetap tinggi dan berhasil menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Timur, salah satunya yaitu bantuan program PUAP yang diberikan kepada desa-desa di Kecamatan Sukodono secara berkala sejak tahun 2009 lalu. Namun dari 13 desa yang semula terlibat dalam program ini, hanya 5 desa yang mampu bertahan dan memperlihatkan kemajuan signifikan dalam hal pengelolaan dan penambahan modal bantuan.

Tabel 1.1 Data Desa Penerima Program PUAP di Kecamatan Sukodono

No.	Nama Desa	Jumlah Petani (orang)	Tahun	Keterangan
1.	Bangsri	157	2014	Masih berjalan
2.	Masangan wetan	86	2009	Tidak berjalan
3.	Masangan kulon	146	2009	Masih berjalan
4.	Suruh	133	2015	Tidak berjalan
5.	Pekarungan	76	2013	Tidak berjalan
6.	Kebonagung	60	2015	Tidak berjalan
7.	Cangkringsari	187	2009	Masih berjalan
8.	Pademonegoro	135	2016	Tidak berjalan
9.	Plumbungan	137	2009	Tidak berjalan
10.	Kloposepuluh	240	2009	Masih berjalan
11.	Ngaresrejo	82	2015	Masih berjalan
12.	Jumputrejo	272	2009	Tidak berjalan
13.	Sambungrejo	239	2013	Tidak berjalan

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 1.1 menunjukkan data 13 desa yang menjadi penerima program PUAP pada tahun pemberian yang bervariasi dan seluruh desa tersebut memiliki

komoditas utama berupa padi. Hasil wawancara dengan Ibu Suci Fitri Ancat Pamungkas, SP., selaku Koordinator Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sukodono pada hari Senin, 2 Desember 2024 menunjukkan bahwa masalah empiris dalam pelaksanaan Program PUAP di Kecamatan Sukodono adalah keberlanjutan program tersebut dimana dari 13 desa penerima hanya 5 desa yang masih menjalankan program hingga saat ini, salah satu yang dinilai paling berhasil dalam mempertahankan keberlanjutan adalah Desa Bangsri. Terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan program PUAP di 8 desa pada Kecamatan Sukodono tidak berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut diantaranya adalah kurangnya pengetahuan petani mengenai program PUAP sehingga petani merasa enggan mengembalikan dana pinjaman PUAP, serta Gapoktan yang merasa tidak memiliki kapabilitas sumber daya yang cukup untuk mengelola dana pinjaman PUAP. Selain itu, terdapat kasus penyalahgunaan dana pinjaman PUAP oleh Gapoktan yang semakin memperburuk situasi. Petani juga masih memiliki bergantung pada kredit informal seperti tengkulak, pedagang, dan keluarga yang memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan kredit formal yang memiliki prosedur lebih jelas. Kondisi tersebut tentu mempengaruhi keberlanjutan program PUAP di wilayah tersebut.

Keberlanjutan program PUAP dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Pertama, manajemen Gapoktan. Gapoktan memegang peran sentral dalam merencanakan, menyalurkan, dan mengawasi dana PUAP. Kemampuan mereka dalam mengelola program sangat menentukan apakah program dapat berjalan dengan baik atau tidak. Kedua, kapasitas petani. Tingkat pendidikan, pengalaman, dan pemahaman petani terhadap program menjadi

penentu utama keberhasilan dalam pemanfaatan dana PUAP. Ketiga, dukungan dari pemerintah. Bantuan berupa pelatihan, pendampingan, dan monitoring dari pemerintah mampu memperkuat kelembagaan lokal dan menjaga konsistensi pelaksanaan program.

Penelitian mengenai keberlanjutan program PUAP akan memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan, seperti manajemen Gapoktan, kapasitas petani, dan dukungan pemerintah. Identifikasi kredit usahatani, baik formal maupun informal, di Desa Bangsri diperlukan karena akses terhadap pembiayaan merupakan salah satu elemen penting yang mendukung keberlanjutan program PUAP. Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi Gapoktan lainnya untuk meningkatkan faktor-faktor pemicu keberlanjutan, sebagaimana yang diterapkan di Desa Bangsri. Dengan demikian, Gapoktan di Desa Bangsri dan di tempat lain dapat memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan untuk memperkuat faktor-faktor yang mendorong keberlanjutan, khususnya program PUAP. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kredit Usahatani dan Keberlanjutan Program Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) di Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu :

1. Apa saja dan bagaimana jenis kredit usahatani baik formal maupun informal di Desa Bangsri Kecamatan Sukodono?

2. Apakah manajemen gapoktan, kapasitas petani, dan dukungan pemerintah berpengaruh terhadap keberlanjutan program PUAP di Desa Bangsri Kecamatan Sukodono?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi jenis kredit usahatani baik formal maupun informal di Desa Bangsri Kecamatan Sukodono.
2. Untuk menganalisis pengaruh manajemen gapoktan, kapasitas petani, dan dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan program PUAP di Desa Bangsri Kecamatan Sukodono.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pertanian Program Studi Agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Pembanguna Nasional “Veteran” Jawa Timur serta sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman kerja dan memahami profesi dan meningkatkan kemampuan dalam diri.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan pustaka bagi Fakultas pertanian khususnya program studi agribisnis UPN “Veteran” Jawa Timur dalam optimalisasi kebijakan kredit pertanian khususnya pada program PUAP.

3. Bagi Desa Penelitian

Hasil dari penelitian yang didapatkan selama kegiatan penelitian dapat menjadi bahan referensi bagi Gapoktan penerima bantuan modal program PUAP lainnya agar memiliki keberlanjutan dan pencapaian yang baik seperti pada Desa Bangsri.